

ABSTRAK

Sebagai aktor pahlawan devisa Negara, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merupakan pekerja berasal dari Indonesia serta menghasilkan barang atau jasa dan mendapatkan upah di Negara lain. Sudah seharusnya para TKI mendapatkan Perlindungan secara utuh, sebagai timbal balik antara pemerintah terhadap TKI baik dari pra penempatan, penempatan, sampai purna penempatan. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal tanggung jawab terhadap TKI yang mengakibatkan permasalahan, dan realita perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pamekasan terhadap TKI. Penelitian ini memaparkan tentang pemilahan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap TKI serta peran pemerintah kabupaten Pamekasan dalam melindungi TKI yang berasal dari kabupaten tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris di beberapa instansi yang bertanggung jawab atas TKI di kabupaten Pamekasan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Hasil dari penelitian ini, terdapat pemilahan tanggung jawab dalam melindungi TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Serta realita perlindungan TKI asal kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan terdapat berbagai permasalahan mulai dari banyaknya TKI nonprosedural, deportasi, dan lain sebagainya.

Kata Kunci : TKI, Perlindungan TKI, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Role as foreign exchange's heroes, Indonesian migrant workers which come from Indonesian and also produce goods and services that obtain wages in other country. Indonesian migrant workers should have been get fully protection as mutual advantages beetwen government for Indonesian migrant workers, such as pre-placement, during placement, post-placement. A lack of coordination beetwen central government and local government is responsibility of Indonesian migrant workers resulting problems and real protection which conduct by local government of Pamekasan district to Indonesian migrant workers. The research describe about sorting process of responsibilty beetwen central government and local government to Indonesian migrant workers, and role of Pamekasan district government in protecting Indonesian migrant workers which come from their district.

Method of this research used empirical research in several agency which responsible for Indonesian migrant workers in Pamekasan district, reviewing applicable term of law and what fact was happened on it's society

Reseach result, there is sorting process in protecting Indonesian migrant workers which conduct by central government and local government. As well as the real protection of Indonesian migrant workers from Pamekasan district government occured various problem such as a lot of nonprocedural, deportation, and many more

Keywords : Indonesian migrant workers, Protection of Indonesian migrant workers, Local government

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1. Teoritis.....	8
2. Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis Penelitian	12
1.6.2 Teknik Pendekatan	13
1.6.3 Data Penelitian.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.5 Analisis Data Penelitian	16
 BAB II TINJAUAN PROSEDUR DAN PERLINDUNGAN TKI	 17
2.1 Tenaga Kerja Indonesia	17
2.1.1 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	18
2.1.2 Hak Tenaga Kerja Indonesia	18
2.1.3 Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia.....	20
2.2 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.....	21
2.2.1 Pengertian Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	21
2.2.2 Bentuk Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia...	25
2.3 Prosedur Penempatan TKI.....	27
2.4 Instansi yang Berwenang dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia.....	35

2.4.1 Dinas Tenaga Kerja Indonesia	35
2.4.2 Perusahaan Penempatan TKI Swasta	36
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TKI KABUPATEN	
PAMEKASAN	39
3.1 Gambaran Tempat Penelitian	39
3.1.1 Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Pamekasan	39
3.2 Keadaan TKI di Kabupaten Pamekasan	43
3.3 Tanggung Jawab Perlindungan Pemerintah Terhadap TKI	48
3.3.1 Pemerintah Pusat	49
A. Bentuk Perlindungan Pemerintah Pusat Terhadap TKI Prosedural	51
B. Bentuk Perlindungan Pemerintah Pusat Terhadap TKI Nonprosedural	52
3.3.2 Pemerintah Daerah	48
A. Bentuk Perlindungan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Terhadap TKI Prosedural	56
B. Bentuk Perlindungan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/kota Terhadap TKI Prosedural	56
C. Bentuk Perlindungan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Terhadap TKI Prosedural	57
D. Bentuk Perlindungan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/kota Terhadap TKI Nonprosedural	57
3.4 Peran Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia	59
3.4.1 Peran Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Korwil Madura dalam Melindungi TKI	64
3.4.2 Hambatan Dalam Melindungi TKI Asal Kabupaten Pamekasan	66
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Dokumentasi
Lampiran II	: Data Penempatan
Lampiran III	: Data PPTKIS terdaftar di Disnaker Kabupaten Pamekasan
Lampiran IV	: Draft Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perbedaan Peran Pemerintah Daerah dan Pusat Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Berdasar UU Pemerintahan Daerah
Tabel 1.2	: Keaslian Penelitian
Tabel 3.1	: Penduduk Kabupaten Pamekasan 2016 berdasarkan wilayah kecamatan
Tabel 3.2	: Data ketenagakerjaan kabupaten Pamekasan 2011-2015
Tabel 3.3	: Penempatan TKI 2016 berdasarkan kabupaten di Madura
Tabel 3.4	: Data Deportasi TKI asal Kab Pamekasan Tahun 2015
Tabel 3.5	: Daftar pembagian Tanggung jawab Pemerintah dalam menangani TKI yang dideportasi

DAFTAR SINGKATAN

BNP2TKI	: Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
DISNAKERTRANS	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
HAM	: Hak Asasi Manusia
IKMA	: Ikatan Keluarga Madura
KTLN	: Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
LP3TKI	: Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
P4TKI	: Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
PAP	: Pembekalan Akhir Pemberangkatan
PPTKIS	: Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKIB	: Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UU PPTKILN	: Undang-Undang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNIO	: Warga Negara Indonesia <i>Overstayers</i>

DAFTAR GAMBAR

	Hlm
Gambar 2.1 Prosedur Menjadi TKI	28
Gambar 3.1 Struktur Organisasi DISNAKERTRANS kab Pamekasan	42